

PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA

Siti Kholidah Hasibuan, Chadir

Universitas Pasir Pengaraian

sitikholidah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara baik secara parsial maupun simultan. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) dengan responden sejumlah 79 responden. Variabel bebas dalam penelitian ini kompetensi (X1), komitmen organisasi (X2), partisipasi masyarakat (X3) dan variabel terikat akuntabilitas (Y). Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 95,4% akuntabilitas dipengaruhi oleh kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat, sedangkan sisanya 4,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil pengujian secara parsial maupun secara simultan kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas.

Keywords: kompetensi, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of village officials' competence, commitment of village government organizations and community participation on accountability for village financial management in North Tambusai District both partially and simultaneously. The sample determination technique uses a saturated sampling technique (census) with 79 respondents. The free variables in this study were competence (X1), organizational commitment (X2), community participation (X3) and accountability-bound variables (Y). Data analysis using multiple linear regression analysis. The results showed that 95.4% of accountability was influenced by competence, organizational commitment and community participation, while the remaining 4.6% was influenced by other variables that were not studied in this study. The conclusions of this study based on the results of partial testing and simultaneously competence, organizational commitment and community participation have a significant influence on accountability.

Keywords: competence, organizational commitment, community participation, accountability

PENDAHULUAN

UU Desa memuat kebijakan tata kelola desa yang mana kebijakan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran dana desa yang besar kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa dalam jumlah besar sudah dianggarkan oleh pemerintah yang terbagi dalam lima tahun (2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020) setiap tahun penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa.

Anggaran Dana Desa yang dianggarkan pemerintah di tahun 2016 yaitu sebesar Rp 46,69 Triliun, kemudian meningkat lagi di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 60 Triliun, di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 60 Triliun dan di tahun 2019 yaitu sebesar 62 Triliun. Anggaran Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa secara khusus diberikan dengan harapan dapat meningkatkan jumlah desa mandiri dan mengurangi desa tertinggal pada tahun 2020. Tahun 2017 dari survey di 61.289 desa atau 82% dari total desa, mengalami peningkatan 2.318 desa mandiri dan penurunan desa tertinggal sebanyak 8.305 desa.

Pemanfaatan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dikatakan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan pencairan dana desa pada tahap kedua yang dikarenakan administrasi yang belum lengkap yang berakibat munculnya kekhawatiran dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Aturan tersebut dijelaskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan dipemerintahan desa, demi terselenggaranya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas dapat memberi gambaran dari sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, oleh karena itu akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas menjadi kontrol terhadap segala aktivitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, sehingga peran mereka sebagai agen menjadi faktor penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya, dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya.

Selain itu, komitmen organisasi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas. Cavoukianet (2012:408), menyatakan bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Roberts (2012:664), bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Brown dan Moore (2012:20), bahwa perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen.

Mengurangi munculnya kesalahan dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan juga semakin baik. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula.

Kecamatan Tambusai Utara merupakan pemekaran dari Kecamatan Tambusai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2003. Dengan jumlah penduduk Per 30 September tahun 2017 berjumlah 86.447 jiwa dan luas wilayah 5.054 km², Kecamatan Tambusai Utara memiliki berbagai macam suku dan ragam budaya. Kecamatan Tambusai Utara memiliki 11 desa.

Alokasi Dana Desa di setiap desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu jumlahnya berbeda-beda dan berfluktuatif dari tahun 2018-2019. Hal ini disebabkan karena sumber pendapatan Asli Desa pada setiap desa tidaklah sama. Seperti terlihat pada tabel 1.1 untuk Desa Tambusai Utara jumlah PADesa nya dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 672.000.000 meskipun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp. 564.721.418, sedangkan PADes yang terendah adalah Desa Mekar Jaya, pada tahun 2018 jumlahPADes

Desa Mekar Jaya sebesar Rp. 15.000.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp. 26.880.000.

Kemudian untuk Alokasi Dana Desa pada setiap desa jumlahnya juga berbeda-beda setiap tahunnya, namun besarnya jumlah Alokasi Dana Desa untuk beberapa desa pada tahun 2018, pengalokasian ADD yang jumlahnya sama besar yaitu pada Desa Bangun Jaya, Simpang Harapan, Pagar Mayang, Payung Sekaki, Mekar Jaya dan Desa Tanjung Medan. Desa yang terbanyak menerima ADD yaitu Desa Mahato, Suka Damai, Tambusai Utara, Rantau Sakti dan Mahato Sakti. Begitu juga untuk tahun 2019, jumlah ADD pada setiap desa di Kecamatan Tambusai Utara mengalami peningkatan jumlahnya namun pengalokasianya pada setiap desa hampir sama besar dengan desa lainnya, hal ini disebabkan karena pada masing-masing desa berbeda jumlah penduduk desanya, jumlah penduduk miskin desa dan Luas wilayah desanya.

Di balik kesuksesan pengelolaan dana desa di Kecamatan Tambusai, ada beberapa masalah didalam penyelenggaranya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa orang perangkat desa yang dipilih secara acak ditemukan permasalahan yang berhubungan dengan kompetensi aparatur desa berupa kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang dimiliki aparatur desa kurang sesuai atau kurang mendukung pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, padahal pengelolaan keuangan desa diperlukan pengetahuan mengenai akuntansi agar mampu dalam menyusun laporan keuangan. Fakta dillapangan seorang bendahara desa hanya memiliki latar belakang pendidikan SLTA yang notabennya kurang mahir dalam penghitungan atau akuntansi, selain itu minimnya pelatihan bagi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi masalah utama penyebab kurangnya keterampilan yang dimiliki aparatur desa.

rata-rata tingkat pendidikan yang dimiliki aparatur desa adalah SLTA yang tentunya kurang mendukung pekerjaannya yang menjadi tanggung jawab aparatur desa. Tentunya hal ini menjadi kendala terutama bagi kepala desa, bendahara desa dan sekretaris desa yang memiliki andil besar dalam mengelola keuangan desa, sehingga masalah keterlambatan pelaporan keuangan desa sering tidak bisa dihindari. Pemerintah daerah memiliki peranan dalam memperhatikan mengenai kompetensi pengelola keuangan desa dengan memberikan petunjuk mengenai pengelolaan keuangan secara detail dalam rangka penyelenggaraan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa perlu diberikan sosialisasi atau pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dana desa.

Permasalahan lain yang timbul dalam hal pengelolaan dana desa adalah beberapa desa memiliki aparatur desa yang berkomitmen kurang dalam organisasi,

seperti KAUR desa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas sesuai topoksi yang ada, namun pada kenyataannya, KAUR desa terkadang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Ketika masyarakat ingin berurusan di kantor desa, KAUR desa jarang berada ditempat untuk bisa melayani masyarakat.

Permasalahan partisipasi masyarakat berdasarkan hasil observasi peneliti berupa kurang dilibatkannya masyarakat dalam menetukan program desa atau pengambilan keputusan mengenai kepentingan bersama untuk memastikan orientasi dan arah pembangunan desa. Biasanya para perangkat desa sudah terlebih dahulu merumuskan program desa setiap tahunnya. Masyarakat hanya diberitahu apa saja program desa yang akan datang pada musyawarah desa. Selain itu, masih minimnya partisipasi masyarakat dalam evaluasi, menyangkut urusan pelaksanaan program secara keseluruhan untuk mengetahui keberhasilan program sesuai dengan perencanaan dan terhindar dari penyimpangan.

Dari segi akuntabilitas pengelolaan dana desa, menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. Kenyataannya kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa, seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan Pengeluaran.

Penelitian yang menggunakan variabel kompetensi aparat desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masayarakat dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Aulia (2018) yang menemukan hasil baik secara parsial maupun simultan kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Aulia (2018) terletak pada variabel bebas yang digunakan yaitu Aulia (2018) menggunakan vabel bebas kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian internal, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel bebas kompetensi aparat desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat, serta perbedaan pada lokasi penelitian. tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.

Menurut Malthis & Jakcson (2013:17) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Menurut Malthis & Jakcson (2013:17), ada tiga indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Kesadaran dalam bidang kognitif. Seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.

2. Kemampuan (*skill*)

Sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan meliputi keterampilan membuat jurnal, menyusun dan menyajikan laporan keuangan, inisiatif dalam bekerja.

3. Sikap (*attitude*)

Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya memiliki tanggung jawab dan mengedapankan etika dalam bekerja.

Robbins & Judge (2011:100) mendefinisikan komitmen organisasi adalah Suatu keadaan seorang pegawai memihak organisasi tertentu serta bertujuan dan keinginannya untuk dapat mempertahankan diri menjadi anggota dalam organisasi. Menurut pengutipan diatas bahwa komitmen organisasi merupakan keinginan dalam diri pegawai untuk dapat menjadi salah satu keluarga didalam suatu organisasi dan berupaya untuk dapat menjadi yang terunggul didalam tujuan organisasi. Ikhsan (2012:55) ada tiga indikator mengenai komitmen organisasi yaitu:

1. Afektif terjadi apabila pegawai ingin menjadi salah satu bagian struktur dari organisasi karena adanya perseptakan emosional pegawai terhadap organisasi.
2. Keberkelanjutan tampak jika seorang pegawai tetap ingin bertahan di suatu organisasi disebabkan butuhnya gaji beserta keuntungan lainnya, atau pegawai tersebut tidak mendapatkan pekerjaan lainnya. Sedangkan pegawai itu berada diorganisasi tempat pegawai bekerja karena pegawai membutuhkan organisasi itu untuk kelangsungan hidupnya.

3. Normatif tampak dari peringkat diri pegawai. Pegawai dapat bersitegang menjadi anggota suatu organisasi karena mempunyai kesadaran bahwa komitmen kerja merupakan hal yang harus dipertahankan".

Pengertian partisipasi menurut Mikkelson (2011:58), adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Mikkelson (2011:58) sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan

Ikut serta mengajukan usul atau pendapat mengenai usaha-usaha pembangunan baik yang dilakukan langsung maupun melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada dan ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang penentuan program mana yang dianggap cocok dan baik untuk masyarakat.

2. Adanya pengawasan dari masyarakat

Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan bersama termasuk di dalam mengajukan saran, kritik dan meluruskan masalah yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan tersebut.

3. Keterlibatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa

Ikut serta bertanggung jawab terhadap berhasilnya pelaksanaan program yang telah ditentukan bersama dan ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah termasuk dalam hal ini memberikan sumbangan, baik berupa tenaga, iuran uang dan material lainnya.

4. Keterlibatan dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa

Ikut serta menikmati dan memelihara hasil-hasil dari kegiatan pembangunan.

Menurut Arifiyadi (2011:17) dalam konsep tentang akuntabilitas dan implementasinya di Indonesia, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Brady & Cronin (2011:12) mengusulkan lima indikator akuntabilitas pelayanan publik yaitu:

1. Kejujuran dan hukum diukur dengan:

- a. Kejujuran dan keterbukaan informasi

Kejujuran merupakan pencatatan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran penggunaan dana desa secara benar dan disertai dengan bukti yang mendukung, sedangkan keterbukaan informasi yaitu kemudahan akses informasi oleh masyarakat.

- b. Kepatuhan dalam pelaporan

Pencatatan laporan kegiatan desa secara lengkap dalam laporan pertanggung jawaban.

2. Proses diukur dengan:

- a. Kesesuaian prosedur

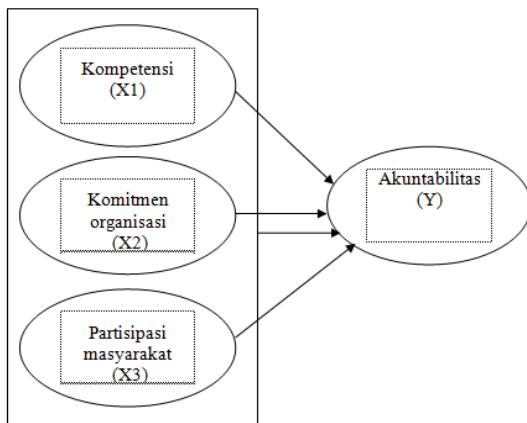
Pelaksanaan program desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- b. Kecukupan informasi

Penyajian laporan keuangan yang berisi semua informasi secara lengkap.

- c. Ketepatan penyampaian laporan

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.



Gambar 1.Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

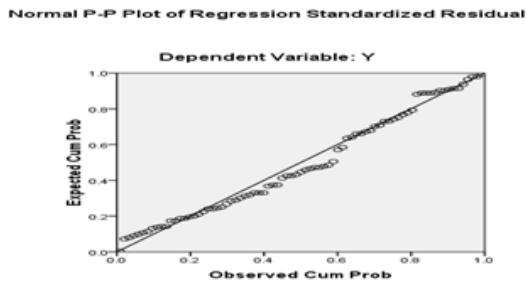
Populasi penelitian ini perangkat desa yang ada di 11 desa Kecamatan Tambusai Utara sebanyak 79 orang perangkat desa. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh (sensus), maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 79 orang. Variabel bebas dalam penelitian ini kompetensi (X1), komitmen organisasi (X2), partisipasi masyarakat (X3) dan variabel terikat akuntabilitas (Y).

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, wawancara dan penelitian keputakaan. Uji keandalan instrument meliputi uji validitas dan uji realibilitas, uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas. Dalam kuisioner ini di gunakan skala likert yang terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Skala likert adalah skala yang di rancangkan untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkatan setiap objek yang akan di ukur. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu menguji signifikansi pengaruh antara *dependent variable* dengan *independent variable*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan mengenai kompetensi (X1), komitmen organisasi (X2), partisipasi masyarakat (X3) dan akuntabilitas (Y) yang sebanyak 27 pernyataan adalah valid karena menunjukkan hasil r hitung yang lebih besar dari r tabel, artinya semua butir pernyataan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan mengenai kompetensi (X1), komitmen organisasi (X2), partisipasi masyarakat (X3) dan akuntabilitas (Y) yang berjumlah 27 item pernyataan adalah *reliable* karena menunjukkan hasil a hitung yang lebih besar dari 0,6, artinya semua butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data

Sumber:Pengolahan data spss, 2021

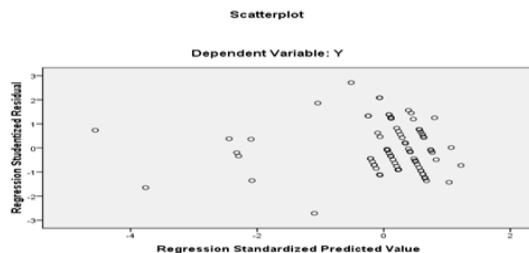
Berdasarkan tampilan *out put* pada gambar 1, terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolonearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kompetensi	.758	1.319
Komitmen organisasi	.586	1.708
Partisipasi masyarakat	.745	1.342

Sumber:Pengolahan data spss, 2020

Dari tabel 1. menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Dan nilai VIF semua variabel independen lebih kecil dari 10 yang berarti tidak terjadi multikolonearitas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.



Gambar 3.Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber:Pengolahan data spss, 2021

Dari grafik scatterplot yang ada pada gambar 3. dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali 2012:107).

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	.752	.798	
Kompetensi	1.117	.028	1.108
Komitmen organisasi	.436	.032	.436
Partisipasi masyarakat	.085	.019	.129

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan data spss, 2021

Dari hasil analisis data menggunakan bantuan SPSS for Windows 18 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0.752 + 1.117X_1 + 0.436 X_2 + 0.085 X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 0.752 menyatakan bahwa jika nilai kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat nilainya adalah 0, maka akuntabilitas (Y) nilainya adalah 0.752.
- Koefisien regresi X1 sebesar 1.117 yang bernilai positif menyatakan bahwa jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan kompetensi mengalami kenaikan sebesar 1% maka akuntabilitas akan mengalami kenaikan sebesar 1.117. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa terjadi hubungan positif yaitu dengan adanya kenaikan nilai kompetensi, maka akuntabilitas akan meningkat.
- Koefisien regresi X2 sebesar 0.436 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1% komitmen organisasi akan meningkatkan akuntabilitas sebesar 0.436. Hal ini dapat diartikan bahwa komitmen organisasi bisa meningkatkan akuntabilitas dan terjadi hubungan positif yaitu dengan adanya kenaikan komitmen organisasi, maka akuntabilitas akan naik.
- Koefisien regresi X3 sebesar 0.085 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1% partisipasi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas sebesar 0.085. Hal ini dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat bisa meningkatkan akuntabilitas dan terjadi hubungan positif yaitu dengan adanya kenaikan partisipasi masyarakat, maka akuntabilitas akan naik.

Tabel 3. Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.978 ^a	.956	.954	.636

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Pengolahan data spss, 2021

Berdasarkan tabel 3. diketahui nilai R square sebesar 0,954 (95,4%), ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang didapatkan dimana variabel independen yaitu kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh terhadap variabel akuntabilitas sebesar 95,4%, sedangkan sisanya 4,6% dijelaskan dengan faktor atau variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan hasil deskriptif untuk variabel kompetensi yang berada pada kriteria baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang dimiliki pegawai bagian pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tambusai Utara sudah baik. Hasil yang tertinggi pada variabel kompetensi pernyataan nomor 2 yaitu saya memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai penyusun laporan keuangan dengan kriteria sangat baik, artinya pegawai bagian pengelolaan keuangan desa sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaan dengan baik. Namun terdapat kelemahan dengan adanya tanggapan yang paling rendah pada pernyataan nomor 7 yaitu saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai, artinya pegawai bagian pengelolaan keuangan desa walupun sudah memahami dengan baik apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya, namun belum bisa sepenuhnya berpegang teguh pada peraturan yang telah ditetapkan.

Dari hasil perbandingan hasil t_{hitung} diketahui bahwa variabel kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada (2017), Atiningsih (2018) dan Aulia (2018) yang menemukan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi yang kompeten dapat mendorong aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Apabila mereka gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi tidak tepat dan dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya.

Pengaruh Komitmen organisasi terhadap Akunabilitas

Berdasarkan hasil deskriptif untuk variabel komitmen organisasi yang berada pada kriteria baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki pegawai bagian pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tambusai Utara sudah baik. Hasil yang tertinggi pada variabel komitmen organisasi

pernyataan nomor 6 yaitu saya merasa bangga jika saya tergolong kepada pegawai yang berkualitas dengan kriteria sangat baik, artinya pegawai bagian pengelolaan keuangan desa memiliki motivasi yang tinggi untuk memajukan organisasi dengan menghasilkan kinerja yang baik sehingga menjadi pegawai yang berkualitas dalam bekerja. Namun terdapat kelemahan dengan adanya tanggapan yang paling rendah pada pernyataan nomor 5 yaitu saya merasa memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan saya. Sebaiknya pimpinan lebih memperhatikan pegawai dalam bekerja dengan memberikan motivasi dengan demikian akan timbul rasa komitmen dan tanggung jawab yang tinggi pada diri pegawai terhadap pekerjaannya.

Dari hasil perbandingan hasil t_{hitung} diketahui bahwa variabel komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada (2017), dan Aulia (2018) yang menemukan bahwa komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas. Cavoukianet (2012:408), menyatakan bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Roberts (2012:664), bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Brown dan Moore (2012:20), bahwa perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan hasil deskriptif untuk variabel partisipasi masyarakat yang berada Hal ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa padadesa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara sudah baik. Hasil yang tertinggi pada variabel partisipasi masyarakat pernyataan nomor 2 yaitu masyarakat mengusulkan rencana Anggaran alternatif untuk BPD terhadap rancangan anggaran desa untuk diajukan kepada pemerintah daerah dengan kriteria sangat baik, sedangkan yang paling rendah pada pernyataan nomor 6 yaitu masyarakat mengetahui dengan jelas informasi tentang program-program pembangunan yang dilaksanakan, sebaiknya pihak pemerintah desa lebih bersikap transparan dan terbuka dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-progam yang akan dilaksanakan serta melibatkan masyarakat dalam program tersebut secara langsung.

Dari hasil perbandingan hasil t_{hitung} diketahui bahwa variabel partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap

akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada (2017), Atiningsih (2018) dan Aulia (2018) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Cara mengurangi munculnya kesalahan dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan juga semakin baik. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa yang baik pula.

Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas

Berdasarkan hasil deskriptif untuk variabel akuntabilitas yang berada Hal ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas yang dimiliki pegawai bagian pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tambusai Utara sudah baik. Hasil yang tertinggi pada variabel akuntabilitas pernyataan nomor 3 yaitu penyusunan laporan pertanggung jawaban memuat realisasi pendapatan, belanja desa dan pembiayaan desa secara lengkap dengan kriteria sangat baik, sedangkan yang paling rendah pada pernyataan nomor 6 yaitu pemerintah desa tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan desa. Sebaiknya lebih sering diadakan pelatihan dan pembinaan bagi para pengelola dana desa sehingga mereka lebih memahami dan mengerti tentang tata cara pengelolaan dana desa, dengan demikian dalam penyusunan laporan keuangan desa akan lebih cepat selesai dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil olah data, maka dapat diketahui bahwa kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas berpengaruh secara simultan (bersama-sama). Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan dipemerintahan desa, demi terselenggaranya kesejahteraan dan partisipasi masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.
2. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara.
4. Kompetensi, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kecamatan Tambusai Utara. Besarnya pengaruh yang diberikan variabel kompetensi, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas adalah sebesar 95,4%, sedangkan sisanya 4,6% dijelaskan dengan faktor atau variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

Dari kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan pemimpin kecamatan lebih memperhatikan para pegawai pengelola dana desa agar dalam bekerja tetap mengutamakan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai, sehingga dapat terwujud akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
2. Diharapkan pemimpin desa lebih memperhatikan para pegawai pengelola dana desa dengan memberikan motivasi dalam bekerja, sehingga pegawai memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya.
3. Diharapkan pemimpin desa lebih bersikap transparan terhadap program-program pembangunan desa kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat turut andil berperan mensukseskan program pembangunan desa.
4. Diharapkan pemimpin kecamatan lebih memperhatikan para pegawai pengelola dana desa dengan selalu memberikan pelatihan ataupun *training*, sehingga para pegawai pengelola dana desa dapat memahami dengan baik bagaimana membuat laporan keuangan desa dan dapat melaporkan dengan tepat waktu.
5. Bagi penelitian lain yang hendak melakukan penelitian sejenis agar dapat mengembangkan penelitian serta menambah kekurangan yang ada pada penelitian ini, sehingga makin memperkaya pengetahuan tentang pengaruh kompetensi, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyoso (2012). *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi 2. Banda Aceh: Read.

Arifiyadi (2011). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Rosda Karya

Atiningsih (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintahan Desa se-*

Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyo Lali). Prosiding Seminar Nasional AIMI. Vol.2; 335-345.

Aulia (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota. Jurnal Manejemen dan Administrasi. Vol.4; 25-39.

Behnam dan MacLean (2011). Standar Akuntabilitas Internasional. Jakarta: Salemba Empat.

Brady & Cronin (2011). Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.

Brown L. David dan Moore Mark (2012). Akuntabilitas, Strategi dan Organisasi Non Pemerintahan. Jakarta :Bumi Aksara.

Campo Schiavo and Tomasi Daniel (2012). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta.

Cavoukianet (2012). *Organizational Accountability and Strong Business Practices*. Jakarta: Erlangga.

Ghozali, Imam (2012). *Aplikasi Analisis Multivariat Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hutapea dan Thoha (2011). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta:BPFE.

Ikhsan Fuad (2012). *Manajemen Organisasi*. Jakarta: Rhineka Cipta.

Kusumastuti (2014). Akuntansi Sektor Publik. Andi: Yogyakarta.

Lambert et al. (2012). *Efektifitas Organisasi*. Yogyakarta :BPFE.

Mada (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol.6; 2731-2760.

Mahmudi (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN,.

Malthis & Jakcson (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resource Management)*. Jakarta : Salemba Empat.

Mardiasmo (2012). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Yogyakarta: Andi.

Mikkelson (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat

Moehleriono (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta.

- Nasution Nurhalijah (2012). *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta : Salemba Empat.
- Notoatmodjo Soekidjo (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Pother (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Roberts (2012). *Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta :BPFE.
- Robbins Stephen & Judge (2011). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sembodo (2012). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE: Yogyakarta
- Sopiah (2012). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Steers (2011). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono (2012). *Statiska Untuk Penelitian*. Bandung:Alfabeta.
- Sumaryadi (2012). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sutrisno Edy. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wasis (2012). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta :Rinek Cipta.
- Wibowo (2012). *Manajemen Organisasi*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Supratiknya (2013). *Teori Organisasi*. Jakarta :Gramedia.
- Syahfarnas (2014). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Umam dan Nurjaman (2012). *Manajemen Personalia Sumberdaya Manusia*. Yogyajarta :BPFE.
- Wasis (2010). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta :Rinek Cipta.
- Wiryanto (2015). *Manajemen Organisasi*. Jakarta :Bumi Aksara.